



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW.5704, (021) 3812684 FAKSIMILI (021) 3813039  
SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

4 Mei 2018

Nomor : S-~~3990~~/PB. 2/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Penjelasan Tentang Penyusunan Profil Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018

**Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-466/WPB.13/BD.03.02/2018 tanggal 23 April 2018 hal Data yang Digunakan sebagai Bahan Penyusunan Profil Keuangan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan :
  - a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
  - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3015/PB/2018 hal Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Triwulan I Tahun 2018;
  - c. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-1614/PB.1/2018 hal Penyampaian Template manual IKU Kemenkeu-Two-Three-Four-Five Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu-Three-Four-Five KPPN Tahun 2018.
2. Profil keuangan pemda tersebut digunakan sebagai bahan dalam rangka penyusunan Laporan Analisis Pelaksanaan Anggaran Daerah yang bermanfaat untuk koordinasi, supervisi dan pembinaan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan keuangan daerah, sehingga laporan Profil Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit menyajikan hasil analisis data-data:
  - a. Karakteristik ekonomi regional;
  - b. Perkembangan keuangan pusat dan daerah;
  - c. Perkembangan peraturan tata kelola keuangan pusat dan daerah;
  - d. Perkembangan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah.
3. Batas waktu penyampaian profil keuangan pemerintah daerah sesuai dengan *update* manual IKU tahun 2018, paling lambat tanggal 30 Juni tahun berkenaan.
4. Agar Profil Keuangan Pemerintah Daerah bersifat komprehensif dan memiliki kemanfaatan yang optimal, maka data yang digunakan dalam penyusunan Profil Keuangan Pemerintah Daerah adalah kombinasi dari data tahun sebelumnya (per 31 Desember 2017) sebagai data realisasi serta data tahun berkenaan (per 31 Maret 2018) sebagai data alokasi, realisasi serta proyeksi yang akan menggambarkan kondisi tahun anggaran berjalan.
5. Untuk selanjutnya, penyusunan dan penyampaian Profil Keuangan Pemerintah Daerah dapat mempedomani Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaporan Profil Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur Pelaksanaan Anggaran,

**Didyk Choirael**  
NIP 197104161992011001

Tembusan:  
Para Kepala Kanwil DJPb di Seluruh Indonesia

## **PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PROFIL KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka melaksanakan tugas Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjalankan fungsi pembinaan pelaksanaan anggaran daerah. Pembinaan pelaksanaan anggaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara.

Bahan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah antara lain Laporan Analisis Pelaksanaan Anggaran Daerah dan Kajian Fiskal Regional periode sebelumnya. Salah satu data bahan penyusunan Laporan Analisis Pelaksanaan Anggaran Daerah adalah profil keuangan pemerintah daerah.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Memberikan panduan penyusunan dan penyampaian profil keuangan pemerintah daerah kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka keseragaman data minimal yang disajikan guna meningkatkan kualitas Laporan Analisis Pelaksanaan Anggaran Daerah dan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah.

### **C. DASAR**

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

### **D. PETUNJUK PELAKSANAAN**

1. Pengumpulan data bahan analisis kinerja anggaran daerah, dilakukan dengan:
  - 1) Mengunduh data profil keuangan daerah dari website Pemerintah Daerah;
  - 2) Meminta data secara langsung ke Pemda baik secara elektronik ataupun kunjungan;
  - 3) Mengunduh data indikator makroekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat dari website BPS provinsi dan website BPS kabupaten/kota;
  - 4) Mencari informasi tentang berita-berita dan issue strategis perekonomian daerah melalui media cetak maupun elektronik;
2. Penyiapan bahan analisis kinerja anggaran daerah yang meliputi:
  - 1) Data profil ekonomi daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - 2) Data keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari data APBD, kas daerah, BLUD, investasi daerah, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  - 3) Data peraturan pengelolaan keuangan daerah/pengelolaan APBD;
  - 4) Data hasil audit dan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



3. Pengolahan data bahan analisis kinerja anggaran daerah yang meliputi:
  - 1) Perbandingan profil ekonomi dan kondisi keuangan antar daerah;
  - 2) Klasifikasi dan perbandingan peraturan dasar hukum tata kelola keuangan daerah antar daerah;
  - 3) Klasifikasi dan perbandingan temuan/catatan penting/rekomendasi penyelesaian/opini BPK atas LKPD antar daerah.
4. Menuangkan hasil pengolahan data ke dalam:
  - 1) Ringkasan profil ekonomi antar daerah;
  - 2) Matriks perbandingan kondisi keuangan antar daerah;
  - 3) Matriks klasifikasi dan perbandingan peraturan dasar hukum;
  - 4) Matriks perbandingan temuan/catatan penting rekomendasi.
5. Melakukan analisis:
  - 1) Karakteristik ekonomi regional daerah;
  - 2) Kondisi keuangan regional;
  - 3) Tata kelola keuangan daerah;
  - 4) Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
6. Menyusun Laporan Profil Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan hasil analisis data-data antara lain:
  - 1) Karakteristik ekonomi regional;
  - 2) Perkembangan keuangan pusat dan daerah;
  - 3) Perkembangan peraturan tata kelola keuangan pusat dan daerah;
  - 4) Perkembangan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah.

## **E. SISTEMATIKA LAPORAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II PROFIL EKONOMI DAERAH**

- A. Indikator-indikator Kesejahteraan
- B. Prospek Kegiatan Ekonomi Unggulan
- C. Kondisi Fiskal
- D. Analisis Kemandirian Fiskal Daerah
- E. Analisis Peranan Pusat Di Daerah

### **BAB III KONDISI EKONOMI & KEUANGAN ANTAR DAERAH DAN MATRIK PERBANDINGANNYA**

- A. Profil Singkat Kondisi Ekonomi
- B. Perbandingan Indikator Ekonomi Antar Daerah
- C. Perbandingan Sektor Ekonomi dan Komoditas Unggulan Antar Daerah
- D. Matrik Perbandingan Pendapatan Daerah (Alokasi dan Realisasi Tahun Lalu dan Tahun berjalan)
- E. Matrik Perbandingan Belanja Daerah (Alokasi dan Realisasi Tahun Lalu dan Tahun berjalan)
- F. Matrik Perbandingan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah
- G. Analisis Singkat APBD Pemerintah Daerah

**BAB IV MATRIK PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

- A. Peraturan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah
- B. Matrik Perbandingan Peraturan Daerah

**BAB V MATRIK PERBANDINGAN OPINI, TEMUAN, DAN REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

- A. Opini BPK atas LKPD seluruh Pemerintah Daerah
- B. Temuan/Rekomendasi BPK atas LKPD seluruh Pemerintah Daerah

**BAB VI PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**F. PENYAMPAIAN LAPORAN**

Profil Keuangan Daerah Tahun Anggaran berjalan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran paling lambat tanggal 30 Juni. Laporan disampaikan dalam bentuk softcopy (format pdf) melalui alamat pos-el: *lo.ditpa@gmail.com*.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Mei 2018  
Direktur Pelaksanaan Anggaran,



  
Didyk Choiroel  
NIP 197104161992011001